

DRAMA, MANUVER DAN CAWE-CAWE POLITIK MENJELANG PILPRES 2024

Saipul Hamdi¹, Ikmal Maulana², Ihfan Rahmawadi³, Fatimatuzzahro⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mataram

Email Korespondensi: shamdi@unram.ac.id

ABSTRACT

The 2024 presidential election (Pilpres) contains distinct characteristics that differ from past presidential elections. The 2024 presidential election contest is very complex and unique due to the changing composition of the coalition of political parties supporting the presidential and vice presidential candidates, including President Jokowi's shifting support, which is no longer aligned with his party, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). This article will look at the political events that unfolded during the 2014 presidential election, such as Anies Baswedan's refusal to run as a presidential candidate, Jokowi's feud with the PDIP, and neutrality or interference during the election. This research employs qualitative approaches using data collection procedures through the *desch* study, incorporating media. The findings revealed that Jokowi intervened politically by backing the 02 group in order to assure the continuance of the previously implemented development strategy. There are hints of substantial participation by Jokowi in the process of deciding presidential candidates by supporting parties, such as the nomination of Anies Baswedan. Other data indicate that Jokowi and his family's political moves in the 2024 presidential race contradict the PDIP, culminating in open conflict between the PDIP elite and Jokowi. The appointment of Gibran as Prabowo's vice presidential candidate following the Constitutional Court's decision has sparked debate in the community and led to charges of Jokowi's lack of impartiality in this presidential race. Meanwhile, international media outlets such as Al Jazeera covered the presidential election and reported that Gibran met public expectations.

Keywords: 2024 presidential election, cawe-cawe, conflict, PDIP, Jokowi.

ABSTRAK

Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya. Kontestasi Pilpres 2024 sangat kompleks dan unik karena pergeseran komposisi koalisi partai politik pengusung Capres dan Cawapres, termasuk pergeseran dukungan presiden Jokowi yang tidak lagi sejalan dengan partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Artikel ini akan menguji drama-drama politik yang terjadi selama proses Pipres 2014 termasuk penjegalan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden, konflik Jokowi dengan PDIP dan netralitas atau cawe-cawe selama Pilpres berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui *desch studi* termasuk sumber dari media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jokowi melakukan cawe-cawe politik dengan mendukung kubu 02 untuk memastikan agenda keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan. Dalam proses penentuan kandidat presiden oleh partai pengusung seperti pengusungan Anies Baswedan, terindikasi adanya intervensi kuat dari Jokowi yang dinilai telah melakukan intervensi dalam penentuan wakilnya. Temuan lain menunjukkan bahwa langkah politik Jokowi dan keluarganya di Pilpres 2024 berseberangan dengan PDIP sehingga terjadi konflik yang terbuka antara elit PDIP dengan Jokowi. Majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo setelah putusan MK menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan mengakibatkan tuduhnya ketidaknetralan Jokowi di Pilpres ini. Sedangkan media internasional seperti Al Jazeera memberi atensi terhadap Pilpres kalin ini dan menerangkan jika Gibran berhasil memenuhi ekspektasi pbulik.

Kata kunci: Pilpres 2024, cawe-cawe, konflik, PDIP, Jokowi

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai dinamika sosial-politik yang terjadi menjelang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Diskursus politik khususnya Pilpres 2024

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



nyatanya tidak hanya menjadi ruang kontestasi bagi kelompok elit politik dan tontonan publik, melainkan juga menjadi ruang analitis dari berbagai perspektif yang beragam. Munculnya hasil survei elektabilitas masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) yang beragam, yang juga dibarengi dengan argumentasi logis dari masing-masing praktisi survei dan akademisi menunjukkan bahwa pada tataran yang paling fundamental dalam dunia akademik sekalipun terutama aspek metodologis masih terjadi perdebatan. Sebagian besar sepakat bahwa survei merupakan kegiatan ilmiah yang dapat dipercayai kebenaran dari hasilnya, namun karena banyak yang disponsori oleh para elit politik membuat hasil survei seringkali dipertanyakan. Banyak rekayasa hasil sehingga membuat kredibilitas lembaga survei turun jauh, bahkan seringkali dinilai lembaga abal-abal (Farisa, 2023; Pospíšilová, 2023).

Demokratisasi sistem politik yang terus diupayakan setidaknya sampai dengan saat ini membuat konstelasi politik sangat cair dan mudah berubah sebab dominannya prinsip kebebasan dalam sistem demokrasi itu sendiri. Memasuki babak baru menjelang Pilpres 2024, kita dapat menyaksikan perubahan besar yang terjadi dalam peta politik nasional jika dibandingkan dengan Pilpres 2019. Salah satu perubahan yang paling besar adalah ketika dua poros politik utama yang saling berkontestasi sejak 2014 memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi ((Roosinda & Alfrita, 2019). Dua poros politik itu adalah partai-partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto yang telah berhadapan dengan Joko Widodo selama dua kali kontestasi sejak Pemilu 2014-2019. Sisi baiknya, rekonsiliasi ini setidaknya menyebabkan polarisasi selama 5 tahun terakhir antara 'Cebong' dan 'Kampret' semakin meredup (M.Tazr, 2019; Tarzi, 2019). Namun di sisi lain, besarnya kekuatan politik pemerintah dengan bergabungnya Prabowo beserta partai politik dan koalisi yang dipimpinnya menyebabkan terjadinya ketimpangan antara pemerintah dengan oposisi.

Akibatnya, semakin besar peluang *abuse of power* yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih, pada Pilpres 2024 Prabowo membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan *tagline* melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Koalisi ini didukung oleh hampir setengah dari kekuatan partai-partai di parlemen, dan yang lebih mengejutkan lagi Prabowo sebagai Calon Presiden didampingi oleh Gibran (anak sulung Jokowi) sebagai Calon Wakil Presiden. KIM dianggap sebagai koalisi terkuat saat ini, selain karena jumlah partai pendukung yang sangat banyak, juga kekuatan-kekuatan di pemerintah di mana Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan Gibran masih menjabat sebagai Walikota Solo, dan terlebih Jokowi merupakan presiden RI saat ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan (Hamdi, 2024).

Perubahan konstelasi politik nasional menjelang Pilpres 2024 serta besarnya peluang partai koalisi kekuasaan untuk bertindak *abusif* juga menimbulkan berbagai dinamika lain. Beberapa di antaranya ialah munculnya isu penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden; mulai renggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP yang telah mendukungnya sejak jadi Walikota Solo 2 periode, Gubernur DKI Jakarta, sampai dengan presiden RI 2 periode sehingga netralitas presiden mulai diragukan pada Pilpres 2024 mendatang (Hidayat, 2023). Berdasarkan berbagai diskursus politik yang terjadi menjelang Pilpres 2024 mendatang beserta berbagai konsekuensi yang dapat terjadi, maka penelitian ini urgen untuk dilakukan. Setidaknya terdapat tiga tujuan utama yang hendak dicapai dalam tulisan ini. Tujuan pertama adalah mengeksplorasi proses penjegalan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres di tengah munculnya isu pemerintah yang *abusif* dan terjadinya konflik kepentingan yang menyangkut Presiden Jokowi. Tujuan kedua untuk menginvestigasi manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan tidak mendukung calon dari PDIP Ganjar-Mahfud, dan sebaliknya mendukung Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran. Manuver tersebut juga berdampak terhadap netralitas Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang, sehingga tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 yang mengikutsertakan putra sulungnya dalam kontestasi tersebut.

Berbagai dinamika menjelang kontestasi Pilpres 2024 sebagaimana yang penulis paparkan di atas jelas dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian terdahulu juga menganalisis hal yang serupa, meskipun masih jarang riset yang secara khusus membahas tentang masalah ini karena momentumnya yang sangat baru. Meskipun demikian, beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontestasi Pilpres 2024 juga tidak akan terlepas dari campur tangan atau cawe-cawe seorang

presiden termasuk Jokowi dalam Pilpres mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh R. Arie Febrianto dkk. (2023) menunjukkan bahwa setidaknya cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi dilandasi oleh tiga faktor utama. *Pertama*, Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu serentak tahun 2024 akan berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil. *Kedua*, keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 bertujuan agar kontestasi politik tersebut dapat berjalan dengan aman dan mencegah terjadinya polarisasi besar-besaran seperti Pemilu tahun 2019 yang dapat menyebabkan perpecahan. *Ketiga*, sebagai langkah untuk mengamankan tujuan jangka panjang, presiden ingin memastikan bahwa berbagai proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hilirisasi industri, dan berbagai program pembangunan lainnya dapat tetap berjalan meskipun telah terjadi transisi pemerintahan. Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumadal Simamora dan Udi Rusadi (2024) menunjukkan bahwa Media Indonesia mengonstruksi pernyataan Jokowi untuk cawe-cawe pada Pilpres 2024 merupakan bagian dari sikap ketidaknetralan Jokowi sebagai presiden serta sebagai upaya untuk menakut-nakuti rakyat. Hal ini pada akhirnya berdampak terhadap merosotnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

Peristiwa lain yang juga berkaitan dengan netralitas Presiden Jokowi setelah menyatakan akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 adalah majunya Gibran sebagai Cawapres. Jalan singkat yang dilalui oleh Gibran yang menuai pro kontra di tengah masyarakat menyebabkan wacana politik dinasti semakin menguat. Riset yang dilakukan oleh Asitha Dewi Mustika Syanur dkk. (2023) menerangkan bahwa dinasti politik dapat menciptakan ketidaksetaraan status sosial pada kontestasi politik, sehingga memicu kecacatan beretika dan berdemokrasi dalam politik. Dan jika pencalonan Gibran sebagai Cawapres melalui proses nepotisme, maka tendensi publik terhadap praktik politik dinasti yang dilakukan oleh kekuasaan saat ini akan semakin meningkat. Berbagai literatur di atas telah menerangkan beberapa bagian dari diskursus politik saat ini yang menyangkut ketidaknetralan Jokowi dan adanya wacana politik dinasti. Namun di sisi lain, berbagai literatur tersebut masih belum mengulas dari aspek yang lebih lengkap dan luas, misalnya terkait manuver Presiden Jokowi dari PDIP yang membuat nama Gibran pada akhirnya muncul sebagai Cawapres. Selain itu, keinginan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe tidak hanya berdampak terhadap munculnya potensi ketidaknetralan presiden, melainkan juga memicu tindakan *abuse of power* dari pemerintah misalnya penjejalan terhadap lawan politiknya yang dianggap tidak sejalan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan sekaligus untuk melengkapi dan mengisi *gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengertian lain tentang penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Sukmadinata, 2006). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik, mendalam, luas, dan terperinci mengenai objek atau subjek yang diteliti. Fokus utama penelitian ini pada penggunaan bentuk disfemisme. Objek kajian berupa tuturan Kiky Saputri, Pak RT, Asisten Rumah Tangga, dan narasumber (Kaesang Pangarep). Sumber data penelitian ini berasal dari kanal YouTube yang disiarkan oleh Kiky Saputri. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan teknik catat. Data yang terkumpul ditranskripsi, kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan. Teknik ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Penjagalan Anis dan Penetapan Muhaimin Sebagai Cawapres

Demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang mengedepankan konsep kebebasan dan partisipasi, yang memungkinkan setiap warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat atau dicalonkan menjadi pemimpin sebuah negara. Pengertian tentang demokrasi umumnya merujuk pada pemikiran Abraham Lincoln (Presiden Amerika ke-16) yang mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, inti dari demokrasi adalah kebebasan dan kepemimpinan yang kedua hal ini bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan (Samsul Wahidin, 2010). Demokrasi juga ditandai dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi mekanisme utama dalam menentukan atau memilih pemimpin pemerintahan atau negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah menyelenggarakan Pemilu semenjak tahun 1995 dengan rentang waktu setiap Pemilu selama lima tahun dan sudah berlangsung hingga saat ini (Kompas, 2023). Maka dari itu, pada tahun 2024 Indonesia kembali akan menggelar pelaksanaan Pemilu untuk menentukan pemimpin pemerintahan selanjutnya.

Tahun Pemilu disebut juga sebagai tahun politik yang salah satu instrumen utama dalam perpolitikan Indonesia adalah Partai Politik yang merupakan kendaraan bagi setiap orang yang ingin dicalonkan atau mencalonkan diri dalam kontestasi politik yang ada, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif dan dari tingkat daerah maupun nasional. Salah satu bagian terpenting dari situasi ini adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk dapat mengusung Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), partai politik harus memenuhi *Presidential Threshold* (PT) atau ambang batas pencalonan presiden yang merupakan aturan terkait pencalonan Capres dan Cawapres dalam Pemilu. Berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilu, harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Artinya, untuk Pemilu tahun 2024 besaran PT sebuah partai dapat dilihat dari perolehan suara/kursi dari hasil Pemilu periode sebelumnya yakni tahun 2019. Dalam harian Kompas (2022) disebutkan bahwa persentase PT dari hasil Pemilu legislatif 2019 yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 22,26%, Partai Golongan Karya (Golkar) 14,78%, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 13,57%, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) 10,26%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10,09%, Partai Demokrat (PD) 9,39% , Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8,7%, Partai Amanat Nasional (PAN) 7,65%, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,3%. Berdasarkan data tersebut, hanya PDI Perjuangan yang secara PT dapat mengusung Capres dan Cawapres secara mandiri tanpa koalisi, sedangkan partai-partai lain harus membentuk koalisi untuk memenuhi PT 20% sehingga dapat mengusung Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.

Pada tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan Rasyid Baswedan (Eks Gubernur DKI Jakarta) sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) Republik Indonesia untuk Pemilu 2024. Setelah sebelumnya terdapat tiga nama tokoh yang dinominasikan sebagai Bacapres yang akan diusung yakni Anies Baswedan Rasyid Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Awalnya deklarasi Anies Baswedan sebagai Bacapres oleh partai Nasdem dijadwalkan pelaksanaannya pada 10 November 2022, sehari sebelum ulang tahun Partai Nasdem. Namun, mencuatnya isu terkait dugaan kriminalisasi atau upaya penjagalan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan Partai Nasdem memajukan waktu deklarasi (Tempo, 2022). Anies Baswedan menjadi salah satu pejabat yang diperiksa oleh KPK dalam pengusutan kasus Pergelaran Formula E di Jakarta. Dalam laporan Koran Tempo bertajuk “Siasat Firlu Menjerat Anies Baswedan” edisi Sabtu, 1 Oktober 2022, menyebutkan bahwa adanya upaya sistematis untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E yang ditinjau dari adanya desakan yang dilakukan oleh Ketua KPK terhadap satuan tugas penyelidikan agar menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Maka dari itu, langkah percepatan waktu deklarasi oleh Partai Nasdem ini dapat dinilai sebagai bentuk proteksi yang diberikan kepada Anies Baswedan dari potensi penjagalan melalui kasus Formula E. Sebab, jika penyelidikan KPK dipaksakan digelar saat partai politik sudah mengusung bakal calon, maka berpotensi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



memunculkan kondisi politik nasional yang tidak kondusif sehingga pemeriksaan harus dilanjutkan pasca Pilpres 2024, atau dalam artian lain Anies Baswedan tetap bisa dicalonkan sebagai Bacapres di Pemilu 2024.

Sebagai partai yang memiliki PT sebesar 10,26%, Partai Nasdem harus membentuk koalisi dengan beberapa partai lainnya untuk mencapai standar PT 20% guna dapat mencalonkan Capres yang akan diusung. Maka dari itu, jika dilihat dari gerakan awal yang dilakukan Partai Nasdem pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bacapres, Partai Nasdem aktif melakukan safari politik ke berbagai daerah untuk memperkenalkan Anies Baswedan sebagai Bacapres (Tempo, 2022). Hal ini sekaligus dapat dinilai sebagai upaya Partai Nasdem untuk menarik simpati masyarakat/publik dan meyakinkan partai lain untuk membentuk dan bergabung dalam koalisi dalam mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres di Pemilu 2024. Setelah Nasdem, PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres yang akan didukung pada Pemilu 2024. PKS menggelar kegiatan deklarasi pada tanggal 23 Februari 2023 di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS atau empat bulan setelah deklarasi oleh Nasdem (CNN, 2023).

Tidak berselang lama, Partai Demokrat juga ikut memberikan dukungan kepada Anies Baswedan yang ditandai dengan hasil keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menghasilkan keputusan untuk memberi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres untuk Pemilu 2024, yang selanjutnya dideklarasikan pada tanggal 2 Maret 2023 di Kantor DPP Partai Demokrat (Republika, 2023). Dengan menyusulnya dukungan dari PKS dan Partai Demokrat, maka dapat disimpulkan bahwa partai koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai Capres di Pemilu 2024 resmi terbentuk karena sudah memenuhi standar PT 20% dengan total besaran PT yang didapatkan dari gabungan tiga partai menjadi 28,35%. Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat akhirnya resmi mendeklarasikan pembentukan koalisi pengusung Anies Baswedan pada tanggal 25 Maret 2023 yang diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Deklarasi oleh ketiga Parpol tersebut (Detik, 2023).

Meskipun koalisi pengusung Anies Baswedan resmi terbentuk dan kasus Formula E tidak berlanjut, isu penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 masih terus berlanjut. Pembahasan terkait isu penjegalan ini merupakan salah satu topik utama yang secara intensif dibahas dalam internal KPP dan kerap kali diungkapkan ke publik terkait berbagai upaya sistematis penjegalan Anies Baswedan. Dalam harian tempo (2023), juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan bahwa ada upaya dari pihak tertentu yang memaksakan hanya dua pasangan calon di Pilpres 2024 dan dikecualikan untuk Anies Baswedan. Pihak tersebut merupakan orang-orang yang berupaya melanggengkan kekuasaan dan tidak menginginkan adanya sirkulasi kekuasaan dan perbaikan di negara ini. Indikasi penjegalan tersebut dinilai dari adanya upaya perebutan kepemimpinan Partai Demokrat dari eksternal partai yang terus berlanjut dengan adanya Peninjauan Kembali oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap Surat Keputusan Menkumham tentang kepengurusan Partai Demokrat (Tempo, 2023).

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dinilai terlibat dalam upaya penjegalan Anies Baswedan di Pilpres 2024 bersumber dari pihak pemerintahan. Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Mahfud MD) mengatakan bahwa, penjegalan Pencapresan Anies Baswedan justru berpotensi muncul dari internal koalisi pengusung dan menyarankan KPP untuk lebih kompak dan solid guna berhasil mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres di Pemilu 2024 (Detik, 2023). Penilaian ini juga dapat kita hubungkan dari sikap Mahfud MD yang menolak untuk dipasangkan bersama Anies Baswedan sebagai Cawapres karena berpotensi memunculkan penolakan dari internal koalisi. Selain itu, Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (Adi Prayitno), penjegalan dalam politik merupakan hal yang biasa karena partai politik merupakan aktor rasional dan realistis. Sehingga, Parpol akan berusaha mencari figur yang memiliki kemungkinan menang (Kompas, 2023). Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa isu penjegalan terhadap Pencapresan Anies Baswedan merupakan bagian dari dinamika dan proses politik yang lumrah terjadi meskipun kebenarannya tidak secara eksplisit dibuktikan. Setelah KPP resmi terbentuk, Partai Demokrat menjadi satu-satunya anggota koalisi yang mengusung Ketua Umum partainya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Berdasarkan rilis hasil survei sejumlah lembaga survei di Indonesia, AHY menjadi salah satu figur yang mendapatkan elektabilitas tertinggi khususnya di Pulau Jawa (Kompas, 2023). Dari data tersebut, nilai tawar Partai Demokrat untuk mendorong AHY sebagai Cawapres KPP semakin tinggi. Ditambah Lagi indikasi terpilihnya AHY sebagai Cawapres Anies Baswedan semakin menguat dengan munculnya citra kemesraan antara Anies Baswedan dan AHY yang kerap kali bermunculan ke publik seperti melakukan kegiatan bersama dalam agenda-agenda publik, berfoto dengan membentuk simbol partai demokrat, mengantar dan menjemput Anies Baswedan pergi-pulang haji (Detik, 2023). Meskipun demikian, penentuan Cawapres KPP belum kunjung ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya stagnasi koalisi. Hal ini memunculkan reaksi yang berbeda dari masing-masing partai yang tergabung dalam KPP, salah satunya adalah Partai Demokrat. Dengan menguatnya nama AHY sebagai Cawapres membuat Partai Demokrat semakin mendesak KPP untuk segera menentukan pilihan Cawapres yang akan diusung. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah dengan memberikan ultimatum yang memungkinkan Partai Demokrat menarik diri dari koalisi jika tidak segera menetapkan Cawapres KPP (CNN, 2023). Akhirnya, perkembangan dinamika dalam penentuan Cawapres Anies Baswedan di KPP berujung pada masuknya PKB dalam KPP dan keluarnya Partai Demokrat dari koalisi.

Pada tanggal 1 September 2023, Partai Demokrat resmi keluar dari KPP dan mencabut dukungannya terhadap Pencapresan Anies Baswedan di Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan, Partai Demokrat menilai bahwa ada pemutusan sepihak dalam penentuan Cawapres Anies Baswedan yang dalam hal ini dilakukan oleh Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) yang memutuskan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Ketua Umum PKB) sebagai Cawapres Anies Baswedan (Kompas, 2023). Meskipun penetapan Cak Imin belum secara resmi ditetapkan atau belum di deklarasikan, Partai Demokrat merespon cepat isu pertemuan Surya Paloh dan Cak Imin sebagai sebuah pengkhianatan terhadap partainya. Hal ini berkembang menjadi isu baru yang mengkonotasikan Anies Baswedan sebagai pengkhianat, karena dinilai sudah berjanji untuk memilih AHY sebagai Cawapres yang dibuktikan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Anies Baswedan sebagai bentuk pengutaraan janji Anies Baswedan untuk meminta AHY sebagai Cawapres.

Sementara itu, Anies Baswedan merespon tuduhan pengkhianatan dan penyebarluasan surat tersebut sebagai sikap yang kurang tepat untuk disampaikan dan disebarluaskan (CNN, 2023). Disamping itu, PKS sebagai bagian dari anggota koalisi juga menyayangkan sikap Anies Baswedan yang memutuskan penetapan Cawapres secara sepihak. Oleh karena itu, PKS menghormati sikap Partai Demokrat yang keluar dari KPP. Meskipun begitu, PKS memutuskan untuk tetap mendukung Anies Baswedan Capres dan menerima Cak Imin sebagai Cawapres di Pemilu 2024 (CNBC Indonesia, 2023). Dalam politik, dinamisasi keberpihakan dan penetapan pilihan merupakan keniscayaan yang pasti terjadi. Melalui sikap Partai Demokrat ini, dapat dinilai bahwa kepentingan Partai Demokrat bergabung bersama KPP dan mendukung Anies Baswedan adalah untuk mengusung AHY sebagai Cawapres mendampingi Anies Baswedan. Hal ini ditandai dengan keluarnya Partai Demokrat dari KPP setelah AHY tidak terpilih sebagai Cawapres.

Manuver Politik Keluarga Jokowi dan Perpisahan Dengan PDIP

Pilpres 2024 melahirkan berbagai drama sosial dan politik di Indonesia terutama dari langkah dan manuver politik keluarga presiden Indonesia Joko Widodo. Jokowi dan keluarga mengambil jalan yang berbeda dengan PDIP setelah banyak mengalami perbedaan ide dalam arah pembangunan Indonesia ke depan. Berbagai kasus kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi seringkali mental ketika tidak disetujui oleh ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri termasuk pembangunan bandara di Bali Utara dan sepak bola U-20 yang melibatkan Timnas Israel. Tentu perpecahan Jokowi dengan PDIP sangat disayangkan karena bagaimanapun PDIP memiliki kontribusi besar dalam karir politik Jokowi mengantarkannya sebagai presiden selama dua priode. Jokowi juga identik dengan warna merah dan berideologi Sukarno. Puncak perpecahan dan konflik berawal dari kepastian pencalonan Gibran Rakabuming Raka bersama partai Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto bersama beberapa koalisi partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Garuda, Prima, PBB, Glora dan PSI. Gibran resmi menjadi pendamping Prabowo setelah keputusan MK yang menambah sarat Capres dan Cawapres yakni

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilihan umum. Keputusan MK ini merupakan angin segar buat Gibran dan para pendukungnya yang digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo Subianto di 2024. Pada saat yang bersamaan PDIP terlebih dahulu menetapkan Cawapres pendamping Ganjar Pranowo yakni Mahfud MD.

Terpilihnya Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto membuat pengurus PDIP meradang dan sakit hati. Dia dicap “berkhianat” terhadap keputusan partai PDIP yang telah menetapkan Ganjar-Mahfud sebagai Cawapres dan Cawapres, sebaliknya Gibran bersedia dan menerima pinangan dan berada di pihak lawan dari PDIP. Kader-kader PDIP terus menyuarakan penolakan terhadap Gibran dengan menciptakan stigma negatif atas pencalonannya karena keputusan MK yang meberinya jalan. Gibran juga terus diserang dari aspek hukum akibat keputusan MK yang dinilai cacat konstitusi oleh elit-elit politik PDIP. Muncul istilah “anak haram konstitusi” untuk menggambarkan sosok Gibran yang dinilai sarat dukungan kekuatan nepotisme karena ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran. Selain itu, isu politik dinasti juga digunakan untuk menjatuhkan dan mendegradasi elektoral Gibran. Serangan PDIP ini terus dilakukan melalui kader-kadernya di forum dialog dan juga melalui media online. Serangan lebih intensif setelah Jokowi terlihat condong dan terbuka memberi dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres.

Tanda-tanda majunya Gibran sebagai Wapres setelah adanya pertemuan dengan Prabowo di sebuah restoran di Solo 9 Agustus 2023. Gibran mempertemukan Prabowo dengan relawan setianya Bolone Mase dan perwakilan relawan Jokowi di Jateng dan Jatim. Dalam pertemuan itu para relawan menitipkan pesan dan aspirasi mereka bahwa Gibran sangat cocok untuk mendampingi Prabowo. Para relawan beralih bahwa mereka memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan sepakat untuk mendukung Gibran sebagai Wapres dan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Mereka yakin jika Prabowo dan Gibran berpasangan, maka Indonesia akan lebih maju karena menyatukan dua kekuatan tersebut. Prabowo secara diplomatis menjawab sesuai dengan pandangan para relawan dan dikembalikan ke aspirasi rakyat. Jika rakyat menginginkan kenapa tidak, kata Prabowo. Sementara Gibran menyatakan dirinya belum cukup umur untuk menjadi Cawapres, meskipun banyak tuntutan “*judicial review*” yang masuk ke MK atas sarat atas usia Capres dan Cawapres. Di kesempatan lain Gibran dalam wawancara ditasiun Kompas TV bersama hos Rosiana juga menanyakan apakah akan ikut kontestasi Pilpres 224? Dia hanya menjawab belum cukup umur, dan kemungkinan tidak ada yang mau memilih dirinya. Gibran terus berupaya untuk menghindari spekulasi tentang dirinya yang akan maju sebagai Cawapres. Setelah pemanggilan oleh Sekjen PDIP dan statemen Puan Maharani yang menyatakan “menunggu hasil keputusan MK membuat situasi politik di internal PDIP tidak menentu. Gibranpun hadir di acara Munas PDIP bersama Jokowi, dan tidak lama kemudian muncul video dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Konflik PDIP dan keluarga Jokowi mulai memanas kembali setelah Kaesang bergabung dan diangkat menjadi ketua umum PSI. Keputusan Kaesang ini melahirkan reaksi yang beragam terutama dari kader-kader PDIP yang mulai mencium gelagat yang tidak baik dari keluarga Jokowi. Idealnya, dalam aturan internal partai PDIP bahwa setiap anggota keluarga harus dalam satu partai, tidak boleh berbeda partai. Djarot Saiful Hidayat, salah satu anggota DPP PDIP menyatakan bahwa Kaesang harus berada di PDIP jika mengikuti aturan dan menyarankan supaya membaca dengan cermat AD/RT PSI supaya lebih memahami eksistensi partai tersebut. Sementara Jokowi sendiri hanya bisa merestui, mendukung dan mendoakan anaknya, seandainya dilarangpun mereka akan lanjut dengan keinginannya, kata Jokowi. Keluarga Jokowi terus menjadi sorotan karena berani berpisah dengan PDIP. Pada saat yang bersamaan, politis PDIP mulai berani mengkritisi anak-anak Jokowi dan juga menantunya. Panda Nababan, salah satu tokoh senior PDIP menyatakan bahwa wali kota Solo itu “anak ingusan” yang harus diberi teguran, dan perestasi mereka perlu dipertanyakan termasuk Bobi Nasutioan. Mereka sangat berbeda dengan Jokowi, kata Panda Nababan. Istilah “anak ingusan” menjadi trending topik di media sosial karena menyentil dan merendahkan Gibran. Serangan tokoh-tokoh PDIP inilah yang mendorong kuat Gibran untuk berani maju sebagai Cawapres karena terlanjur dihina dan diterus dikritik.

Teman menjadi lawan, itulah ungkapan yang pas menggambarkan hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP di Pilpres 2024. Jokowi resmi mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



yang sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo. Peralihan dukungan ini menjadi pilihan yang rasional bagi Jokowi karena adanya agenda pembangunan yang berkelanjutan. Prabowo dinilai satu-satunya kadindat presiden yang konsisten mengkampanyekan keberlanjutan program Jokowi. Hadirnya Gibran adalah faktor lain yang dinilai sebagai representasi politik dan legasi Jokowi untuk Indonesia ke depan termasuk jaminan keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jokowi sendiri di beberapa media mendukung semua calon termasuk pasangan Prabowo-Gibran, dan menyatakan netral. Namun faktanya, sulit untuk Jokowi berlaku netral ketika anaknya ikut kontestasi di Pilpres 2024. Sebagai presiden, Jokowi bisa saja mengaku netral, namun sebagai personal Jokowi sudah menyatakan sikap mendukungnya ke Prabowo Subianto. Bahkan di akhir masa kampanye Jokowi mengajak Prabowo makan bakso dan secara terang-terangan akan ikut berkampanye karena dibolehkan oleh Undang-undang. Namun niat untuk ikut kampanye diurungkan karena tekanan dari lawan-lawan politiknya. Prabowo-Gibran juga merasa percara diri tanpa harus melibatkan Jokowi dikampanye mereka karena hasil survei yang terus menunjukkan trend kenaikan, bahkan di atas 50% atau hanya satu putaran.

Setidaknya terdapat lima faktor mengapa Jokowi pecah kongsi dengan PDIP dan hanya mendukung Prabowo Gibran yaitu: Pertama, sikap PDIP yang menolak tawaran politik Jokowi termasuk wacana menyatukan Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024. Jauh sebelum Gibran jadi Cawapres, Jokowi mempertemukan Prabowo dan Ganjar ketika sedang kunjungan panen raya padi di Jawa Tengah. Prabowo dan Ganjar saling bergandengan tangan dan santer diisukan untuk bersama di Pilpres 2024 (Hamdi, 2024). Jokowi yakin mereka dapat memenangkan pertarungan dengan mudah karena hasil survei keduanya tinggi sekali. Jika bersatu maka otomatis tidak sulit untuk menang pada Pilpres 2024. Namun wacana ini ditolak mentah-mentah oleh elit PDIP termasuk ketua umum Megawati Sukarno Putri kecuali Prabowo rela di posisi wakil Ganjar karena PDIP adalah partai pemenang di Pemilu sebelumnya. Megawati menyatakan, jangan dibalik nama Pranowo Ganjar, yang benar itu Ganjar Pranowo. Ungkapan ini sebagai sindirian kepada Jokowi yang mengusulkan duet Prabowo-Ganjar, yang seharusnya Ganjar-Prabowo. Jangan salah sebut kata Mega dan wartawan juga diminta untuk tidak beropini jika belum clear informasinya. Tidak ada itu Prabowo-Ganjar, enak aja, kata Megawati.

Kedua, penolakan PDIP terhadap pelaksanaan piala dunia U-20 di Indonesia. Kader-kader utama di PDIP termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster dan Capres PDIP Ganjar Pranowo secara terbuka menolak pergelaran sepak bola piala dunia U-20 karena keberadaan Timnas Israel yang ikut lolos di piala dunia tersebut. Menurut beberapa sumber bahwa pimpinan PDIP mengambil langkah politik yang tegas dengan menggagalkan perhelatan sepakbola U20 untuk menegakkan konstitusi Indonesia yang melawan penjajahan. Tujuan lain dari kegagalan ini adalah untuk meningkatkan elektoral partai PDIP dengan menggaet suara umat Islam yang sentimen dengan Israel. Langkah politik dari elit-elit PDIP ini yang tidak berkordinasi sebelumnya dengan pemerintah membuat Jokowi kesal, pusing dan murka karena persiapan yang begitu panjang hampir 3 tahun hanya sia-sia dibatalkan tiba-tiba, apalagi persiapannya telah banyak menelan anggaran APBN seperti untuk perbaikan stadion. Hal ini diungkapkan oleh Jokowi ketika menghadiri acara yang diadakan oleh partai PAN dan diwawancarai warga, ada saat itu Jokowi menyatakan pusing dengan sepakbola U-20. Selain Jokowi, Gibran juga terlihat sangat kecewa karena menilai kurangnya komitmen dan tidak konsisten dengan apa yang telah diagendakan jauh-jauh sebelumnya. Meskipun satu kader dengan elit-elit PDIP yang lain, Gibran berani mengambil sikap yang berbeda. Dia juga tidak bisa menyembunyikan kekesalannya karena Solo termasuk salah satu venue pergelaran akbar sepakbola U-20 ini. Gibran awalnya berharap acara U-20 dapat berdampak secara ekonomi untuk warga Solo khususnya pasca Covid-19. Kasus penolakan tim Israel di Piala Dunia ini tidak hanya berdampak pada penurunan hasil survei Ganjar Pranowo, tetapi menimbulkan konflik tersembunyi dengan Jokowi.

Ketiga, perlakuan PDIP terhadap Jokowi yang disebut “petugas partai”. Meskipun menjadi orang nomor satu di Indonesia sebagai presiden, posisi Jokowi tetap dinilai lebih rendah dari ketua umum partai PDIP Megawati karena Jokowi adalah petugas partai yang posisinya ditugaskan oleh PDIP. Wajib hukumnya Jokowi harus tunduk pada garis besar kebijakan partai dan wajib lapor atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Jokowi pernah disidang oleh keluarga besar PDIP, duduk di bangku kecil menghadap Megawati. Pada momen itulah Jokowi kemudian dividoeakan oleh Puan Maharani, putri Megawati yang sekarang menjadi ketua DPR RI dan salah satu ketua DPP PDIP. Video ini viral di media

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



sosial yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, terutama para pendukung dan relawan Jokowi yang tidak terima dengan istilah petugas partai. Sebagian besar netizen yang menyaksikan video presiden menghadap ke Megawati tidak setuju dengan sikap ketua PDIP tersebut yang seolah-olah tidak menghormati orang nomor satu di negeri ini presiden Indonesia. Peristiwa ini terus mendapat atensi dari publik dan menimbulkan pro kontra atas sikap elit-elit PDIP.

Di kesempatan yang lain Megawati juga mencemooh Jokowi di depan peserta yang hadir di acara hari ulang tahun ke 50 PDIP. Mega menyindir nasib Jokowi yang tidak punya kekuatan apapun tanpa dukungan PDIP sebagai partai pengusung. “Ini legal formal lo” kata Megawati sambil tertawa kecil. Jokowi hanya bisa tersenyum melihat sikap dan aksi ketua umum PDIP tersebut yang merendahkan dirinya. Sebelumnya, muncul labeling di masyarakat bahwa Jokowi adalah boneka Megawati. Meme yang beredar di media sosial yakni foto Megawati menggendong Jokowi. Labeling ini dibantah oleh Jokowi yang dengan tegas menyatakan “rasa hormatnya pada ibu Megawati, tetapi dia bukanlah boneka ibu Mega”. Istilah petugas partai merupakan fenomena umum di struktur partai politik, namun tidak semua partai menggunakan istilah ini secara terbuka. Fenomena ini menarik perhatian wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi yang menggunakan seragam “petugas parkir” di acara hari Pembangunan kota Solo. Seragam ini mendapat perhatian dari Yenni Wahid di twitter dengan komentar “ternyata petugas parkir, kirain petugas partai, colek @gibran”, cuit Yenni Wahid melalui akun pribadinya 20 Agustus 2023. Gibran menjelaskan bahwa baju yang dipakai murni pakaian seragam juru parkir di kota Solo, bukan simbol perlawanan atau menyindir siapapun.

Keempat, serangan kader-kader PDIP terhadap politik dinasti. Gibran menjadi titik serangan oleh sebagian besar kader PDIP yang menolak politik dinasti. Politik dinasti dinyatakan barang “haram” oleh PDIP sehingga tidak memberi ruang bagi Jokowi untuk mencalonkan anaknya. PDIP dengan lantang bergerilya menentang politik dinasti melalui kader-kadernya. Sikap PDIP ini berbeda ketika mereka mendukung Gibran sebagai Wali Kota Solo, yang juga menghadapi serangan politik dinasti dari partai oposisi. PDIP justru mati-matian membela Gibran dan berupaya memenangkannya di Pilkada Solo. Tidak hanya persoalan politik dinasti, akan tetapi pengalaman Gibran yang dianggap belum matang di persaingan nasional menjadi salah satu faktor mengapa PDIP tidak mencalonkan Gibran mendampingi Ganjar. Meskipun di sebuah kesempatan Puan Maharani, ketua DPP PDIP melontarkan wacana Gibran sebagai salah satu calon potensial yang akan dampingi Ganjar setelah keputusan MK.

Kelima, tidak ada pelibatan Jokowi dalam penentuan Cawapres yang dampingi Ganjar Pranowo. PDIP terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan Jokowi dalam pemilihan Cawapres untuk Ganjar. Penunjukkan Mahfud MD menjadi Cawapres dilakukan ketika Jokowi sedang berada di luar negeri sehingga tidak ada diskusi sama sekali dengannya. Sebelumnya, beberapa tawaran dan skenario politik untuk calon PDIP namun ditolak terus dan tetap mencalonkan Ganjar Pranowo. Sebagai partai besar PDIP merasa percaya diri dengan mudah akan memenangkan Pilpres tanpa dukungan Jokowi. Modal besar PDIP dengan banyaknya kader yang menjadi kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia tentunya diprediksi akan membawa kemenangan bagi calon presiden yang mereka dukung. Apalagi sebelum pasangan Prabowo-Gibran resmi diumumkan beredar surat kontrak salah satu kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Drama Pilpres 2024: Netralitas Presiden Jokowi Pasca Gibran Resmi Sebagai Cawapres

Kontestasi Pilpres 2024 menjadi salah satu diskursus politik paling menarik, baik ditinjau dari perspektif praktis maupun perseptif akademis. Berbagai drama politik muncul ke permukaan dan menjadi tontonan yang menarik bagi publik sampai dengan saat ini. Setidaknya, drama ini dimulai dengan momentum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang merupakan partai koalisi pemerintah secara “radikal” mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Kompas, 2022). Padahal, pada saat yang bersamaan Anies merupakan salah satu tokoh yang dicitrakan sebagai representasi dari oposisi pemerintah pusat saat ini (Kurniawan dkk., 2023). Tidak sampai di situ, drama lainnya juga muncul ketika Anies pada akhirnya menggandeng Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini menjadi kejutan besar, setidaknya karena dua alasan mendasar. *Pertama*, PKB merupakan bagian dari koalisi pemerintah (Kurniawan dkk., 2023) yang sejauh ini juga telah membangun kedekatan dengan Partai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. *Kedua*, sejauh ini tokoh yang dinilai akan menjadi pendamping Anies pada Pilpres 2024 adalah Agus Harimurti Yudoyono (AHY) yang merupakan ketua Umum Partai Demokrat yang juga telah membangun koalisi bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Puncaknya, Demokrat kemudian menarik diri dari koalisi bersama Nasdem dan PKS, kemudian bermanuver dengan membangun koalisi bersama dengan Partai Gerindra dan partai lainnya yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden (Republika, 2023).

Berbagai dinamika dan drama politik di atas bukanlah pertunjukan terakhir. Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dimotori oleh Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada akhirnya mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden (Tempo, 2023). Penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden menuai berbagai polemik di ruang publik, baik di sisi pro maupun kontra. Hal ini disebabkan karena proses pencalonan Gibran dinilai tidak terlepas dari peran Presiden Jokowi dan Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) yang merupakan paman dari Gibran. Asumsi ini diperkuat oleh dua argumentasi mendasar. *Pertama*, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi calon wakil presiden hanya dengan modal menjadi Walikota selama 2 tahun (Media Indonesia, 2023). Pengalaman ini dinilai masih sangat minim bagi seorang pemimpin negara. *Kedua*, Undang-Undang Pemilu menyaratkan setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya berusia 40 tahun, sementara Gibran masih berusia 36 tahun. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, persyaratan tersebut diubah melalui Uji Materi terhadap UU tersebut melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam keputusan MK yang diketuai oleh Anwar Usman, calon presiden atau calon wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah (MKRI, 2023). Dengan keputusan tersebut, tentu Gibran yang masih belum berusia 40 tahun tetap dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden karena telah memiliki pengalaman sebagai Walikota Solo.

Berbagai polemik yang muncul dalam konteks pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden memunculkan asumsi baru di ruang publik, yakni apakah Presiden Jokowi akan tetap bisa bersikap netral dalam Pilpres 2024 dengan ikut sertanya putra sulungnya (Gibran) dalam kontestasi tersebut. Hal ini menjadi penting, sebab Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki otoritas dan kekuasaan atas berbagai instrumen negara yang bisa saja digunakan untuk menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran akibat adanya konflik kepentingan. Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa cukup sulit untuk mengklaim jawaban atas asumsi tersebut. Sebab, sejauh ini indikator untuk mengukur netralitas masih berlandaskan pada indikator-indikator yang sifatnya sangat subjektif. Klaim apakah penyelenggara negara dapat bersifat netral atau tidak sangat bergantung pada konteks dari pihak mana asumsi itu muncul dan apakah pihak tersebut diuntungkan atau tidak oleh sikap penyelenggara negara dalam kontestasi politik. Oleh sebab itu, untuk menemukan jalan terang sebagai jawaban atas asumsi tersebut, penulis pertama-tama akan menguraikan terlebih dahulu berbagai kompilasi drama Pilpres yang terjadi setelah Gibran secara resmi dideklarasikan sebagai Cawapres Prabowo. Setelah itu, penulis akan mencoba untuk menganalisis berbagai rentetan peristiwa drama tersebut dalam perspektif teori yang relevan dalam kaitannya dengan netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.

Kompilasi Drama Pilpres setelah Gibran Menjadi Cawapres Prabowo

Sulit bagi penulis untuk menentukan peristiwa yang menjadi pemantik awal dari berbagai peristiwa drama Pilpres selama satu tahun terakhir. Namun, jika pembahasannya dikerucutkan ke dalam konteks netralitas Presiden Jokowi, barangkali penulis dapat memulai dari pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024. Cawe-cawe atau ikut membantu mengerjakan yang dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai keterlibatan presiden dalam Pilpres dengan tujuan untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih selanjutnya sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh Presiden Jokowi saat ini (CNBC, 2023). Pernyataan presiden yang akan ikut cawe-cawe pada Pilpres 2024 dinilai oleh publik sebagai bentuk ketidaknetralan presiden dalam Pemilu. Di sisi lain, Istana berargumentasi bahwa hal tersebut bukanlah bagian dari bentuk ketidaknetralan presiden, justru sebagai bentuk tanggung jawab presiden dengan segenap instrumen negara yang ia kuasai untuk memastikan Pemilu dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan konstitusi (CNBC, 2023).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Jika dilihat dari bursa calon presiden yang ada pada saat itu, kemungkinan besar *endorment* Presiden Jokowi akan diberikan kepada dua kandidat, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo (Kompas, 2023). Prabowo dinilai layak mendapat dukungan dari Jokowi sebab ia merupakan Menteri Pertahanan RI yang dicitrakan sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Kerap kali Prabowo mendampingi presiden dalam berbagai kunjungan ke daerah-daerah. Di samping itu, Ganjar juga berpotensi menjadi kandidat yang akan mendapatkan dukungan Jokowi. Selain sama-sama sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar juga beberapa kali terlihat menemani kunjungan Presiden Jokowi. Terlebih, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri kerap kali menegaskan dalam berbagai pidatonya bahwa setiap kader PDIP harus tegak lurus dengan segala hal yang menjadi ketetapan partai, termasuk dalam menentukan dukungan kepada calon presiden yang telah diusung oleh partai. Oleh sebab itu, publik kemudian berasumsi bahwa siapapun yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2024 antara Prabowo dan Ganjar, Istana tetap akan lega karena telah memberikan restu kepada keduanya.

Setelah berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan pasca pernyataan Jokowi untuk cawe-cawe, tampaknya konstelasi politik mulai berubah secara signifikan. *Endorsment* politik Jokowi kepada Ganjar yang diasumsikan publik sebagai salah satu kandidat capres terkuat untuk mendapatkan *endorment* tersebut ternyata dibatalkan (Viva, 2023). Memang pada dasarnya presiden tidak pernah secara eksplisit menyebutkan untuk memberikan *endorment* kepada salah satu capres ataupun membatalkannya, namun publik dapat menilai upaya-upaya tersebut melalui berbagai polemik yang terjadi di kalangan elit yang dipertontonkan ke publik. Manuver yang dilakukan oleh presiden yang mulai meninggalkan PDIP menjadi salah satu faktor penentu pembatalan *endorment* kepada Ganjar. Pada saat yang bersamaan, berbagai kritik dari kader PDIP baik di dalam maupun di luar parlemen yang ditujukan kepada presiden semakin keras disuarakan. Sebaliknya, Presiden Jokowi semakin dekat dengan Prabowo sebagai arah manuver yang baru. *Endorsment* kepada Prabowo semakin terlihat ketika Gibran yang merupakan anak sulung Presiden Jokowi secara resmi dideklarasikan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024 (Detiknews, 2023).

Jalan mulus yang dilalui oleh Gibran untuk menjadi Cawapres mendapat berbagai kritik dari publik, baik dari politisi oposisi, akademisi, maupun masyarakat umum. Berbagai tuduhan kemudian diarahkan kepada pihak Istana, terutama kepada keluarga Presiden Jokowi. Majunya Gibran sebagai Cawapres dianggap sebagai praktik politik dinasti yang dilanggengkan oleh rezim yang dipimpin Presiden Jokowi. Bahkan, sebanyak 60,7% publik menilai bahwa majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo dinilai sebagai bentuk politik dinasti (Kompas, 2023). Hal ini disebabkan karena Presiden Jokowi memberikan ruang kepada anaknya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, padahal Gibran dinilai masih belum layak untuk menjadi wakil presiden, baik secara kompetensi maupun secara regulasi. Secara kompetensi, Gibran masih sangat belia dalam kancah politik. Usianya baru 36 tahun dan baru memiliki pengalaman sebagai walikota hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Pengalaman Gibran di dunia pemerintahan yang masih sangat minim dipandang belum mampu untuk memenuhi kompetensi sebagai seorang wakil presiden. Di samping itu, regulasi terkait batas minimal usia Capres-Cawapres dalam UU Pemilu mengharuskan setiap kandidat memiliki usia minimal 40 tahun untuk maju sebagai Capres Cawapres. Namun, dalam waktu singkat regulasi itu dapat dikondisikan yang memungkinkan Gibran tetap bisa maju sebagai Cawapres meskipun usianya belum 40 tahun.

Peran Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Presiden Jokowi yang menjabat sebagai Ketua MK dianggap memiliki andil besar dalam memuluskan jalan Gibran menjadi Cawapres. Dalam Keputusan MK atas uji materi terhadap UU tentang batas usia minimal Capres-Cawapres, MK yang diketuai Anwar Usman mengabulkan permohonan pemohon, di mana batas usia minimal Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah (MKRI, 2023). Keputusan ini jelas membuat Gibran memiliki kesempatan untuk maju sebagai Cawapres meskipun belum berusia 40 tahun, sebab Gibran memiliki pengalaman sebagai Walikota Solo selama 2 tahun. Di samping itu, pemohon yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah tersebut juga secara terang-terangan menyampaikan dalam permohonannya bahwa ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Gibran yang sangat ia kagumi dan memiliki kompetensi malah tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres karena terbentur oleh aturan mengenai batas minimum usia Capres Cawapres tersebut

(CNN Indonesia, 2023). Sehingga jelas bahwa permohonan uji materi yang dikabulkan tersebut ditujukan untuk Gibran yang pada akhirnya diterima dan diputuskan oleh MK.

Meskipun kemenangan dalam kontestasi Pilpres yang diikuti oleh Gibran sebagai anak Presiden Jokowi ditentukan oleh rakyat melalui proses pemilihan secara langsung, namun berbagai pihak tetap memandang proses-proses singkat yang dilalui oleh Gibran sampai menjadi Cawapres adalah bentuk dari politik dinasti. Sebab, indikator politik itu demokratis atau sebaliknya sebagai politik dinasti tidak hanya sebatas pada proses pemilihan atau penunjukkan orang yang akan melanjutkan kekuasaan. Lebih dari itu, penentuan politik dinasti juga dimulai dari proses kandidasi, yaitu proses penyeleksian kandidat secara internal oleh kelompok-kelompok politik sebelum kandidat tersebut ikut berkontestasi secara langsung dalam Pemilu (Mojok, 2023). Dengan demikian, proses jalan mulus yang dilalui oleh Gibran dalam waktu yang singkat jika merujuk pada indikator pada proses kandidasi masing-masing kandidat tersebut, maka dapat tergolong ke dalam proses dinasti politik.

Manuver Presiden Jokowi dari PDIP ke pihak Prabowo yang kemudian menjadikan Gibran sebagai Cawapres diduga disebabkan karena kekecewaan Jokowi kepada PDIP. Beberapa kader PDIP menerangkan bahwa kekecewaan Jokowi yang membuatnya bermanuver dikarenakan permintaannya agar masa jabatannya sebagai presiden bisa sampai 3 periode telah ditolak oleh Megawati selaku ketua umum PDIP (Tempo, 2023). Penolakan tersebut didasarkan atas keinginan PDIP untuk tetap patuh terhadap konstitusi. Meskipun isu ini dibantah oleh menteri-menteri Jokowi, termasuk juga oleh ketua DPR RI (Puan Maharani), namun majunya Gibran sebagai Cawapres mendampingi Prabowo semakin menguatkan asumsi tersebut. Sebab, dengan terpilihnya Gibran nanti sebagai wakil presiden, tentu Presiden Jokowi tetap akan mendapat legitimasi setelah kekuasaannya berakhir melalui putra sulungnya, Gibran.

Keberpihakan rezim juga semakin terlihat ketika presiden melakukan kunjungan ke Bali. Beberapa saat sebelum presiden mendarat lokasi kunjungan, baliho-baliho Ganjar-Mahfud sepanjang jalan yang akan dilalui oleh presiden dalam kunjungannya tersebut diturunkan oleh aparat dengan dalih penertiban. Tidak hanya itu, kantor cabang PDIP yang berada di Solo juga sempat disatroni oleh aparat kepolisian, tanpa alasan yang wajar. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, tindakan ini merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh aparat agar orang-orang menjadi takut untuk datang ke DPC PDIP di Solo (Detikcom, 2023).

Analisis Teori: Masihkah Presiden Jokowi Netral?

Polemik keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 yang juga menjadi arena kontestasi bagi anak sulungnya telah menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Berbagai asumsi dan tuduhan muncul, mulai dari politik dinasti, dugaan tidak netralnya presiden dalam Pilpres mendatang, dan berbagai isu lainnya. Sejauh belum ada indikator untuk mengukur asumsi-asumsi tersebut, maka selama itu pula kita tidak dapat menjustifikasi asumsi-asumsi tersebut. Oleh karena itu, pada sub bab ini penulis mencoba untuk menghadirkan beberapa indikator berdasarkan perspektif teori yang relevan. Dalam hal ini, penulis menggunakan perspektif teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault. Dalam perspektif teori ini, kekuasaan tidak hanya dipandang sebagai otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Lebih dari itu, kekuasaan itu tersebar dalam setiap relasi sosial, sehingga kekuasaan itu ada dan bergantung pada setiap relasi sosial. Selain itu, terdapat wacana yang dapat berkembang dalam setiap diskursus politik, di mana wacana tersebut diciptakan oleh kekuasaan dengan tujuan untuk menjaga dan melegitimasi kekuasaan itu sendiri (Hamdi dkk., 2023).

Berdasarkan asumsi teori tersebut, maka dinamika politik pasca majunya Gibran menjadi Cawapres dalam kaitannya dengan netraitas Presiden Jokowi dapat diuraikan ke dalam dua aspek utama. *Pertama*, relasi kuasa yang terjadi dalam polemik politik pencawapresan Gibran tidak hanya sebatas pada relasi antara penyelenggara negara (presiden dan MK) dengan rakyatnya (pemohon dan Gibran). Relasi kuasa yang terjadi juga melibatkan hubungan kekerabatan antara aktor-aktor penyelenggara tadi dengan rakyatnya, yakni hubungan kekeluargaan antara presiden dengan Gibran beserta ketua MK. Konsekuensi yang dapat muncul dari bentuk relasi kuasa semacam ini adalah adanya benturan konflik kepentingan, di mana kepentingan Jokowi sebagai presiden dan Anwar Usman sebagai ketua MK berbenturan dengan kepentingannya sebagai seorang ayah dan seorang paman bagi Gibran

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



yang menjadi Cawapres. Pada realitasnya, sangat sulit untuk menghindari benturan kepentingan ini mengingat status dan peran yang melekat pada aktor-aktor penyelenggara negara tersebut sulit dipisahkan secara sosiologis dari status dan peran mereka sebagai keluarga.

Kedua, kekuasaan memiliki otoritas penuh untuk memainkan wacana yang berkembang ke publik. Dalam konteks ini, wacana-wacana lain yang bertentangan dengan kepentingan penguasa akan terpinggirkan karena besarnya pengaruh wacana rezim yang berkuasa. Penguasa dengan segenap instrumen negara yang mereka miliki bisa saja memanfaatkan hal tersebut untuk memainkan wacana dan mengungguli wacana lain yang kontraproduktif dengan apa yang mereka inginkan. Buktinya, sejauh ini pasangan Prabowo-Gibran tidak dapat memainkan wacana yang berkaitan dengan gagasan tentang bangsa ke depan di ruang-ruang publik melalui kegiatan seperti adu gagasan atau seminar yang sifatnya akademis. Mereka justru lebih banyak memainkan wacana politik yang terkesan santai, dan menghindari adu gagasan dengan 2 capres lainnya. Kendati demikian, elektabilitas mereka selalu unggul dibandingkan dengan dua capres lain. Publik lebih senang dengan wacana politik santai atau bahkan *branding* ‘gemoy’ yang dihadirkan oleh pasangan ini, meskipun dianggap minim substansi dan gagasan. Hal ini membuktikan bahwa bagaimanapun rendahnya kualitas wacana yang dimainkan oleh kekuasaan, tetap saja wacana tersebut berpotensi lebih unggul untuk berkontestasi dengan wacana lain yang tidak *diendorse* oleh kekuasaan.

Sorotan Media Internasional Melihat Pilpres 2024

Pemilihan Presiden di Indonesia akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2024 dengan adanya tiga pasangan calon dari partai-partai politik pengusung. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, mendapatkan pengakuan internasional yang signifikan terkait dengan pelaksanaan serangkaian pemilihan umum yang akan dilaksanakan (Pacific, 2023). Oleh karena itu, pemilihan presiden 2024 di Indonesia turut menjadi sorotan dunia internasional. Hal ini terkait dengan calon presiden yang potensial memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di lingkup internasional. Peran media internasional dalam menyoroti aspek-aspek Pemilihan Umum di Indonesia masih tetap terkait erat dengan agenda internasional yang akan dilaksanakan ke depannya. Beberapa contohnya yaitu menindaklanjuti krisis politik di Myanmar yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan, sengketa di Laut Cina Selatan yang masih menghadapi tantangan penyelesaian serta peran pemimpin Indonesia yang aktif di dalam organisasi internasional seperti ASEAN (Basorie, 2023).

Beberapa faktor yang menarik perhatian media internasional terkait Pemilihan Presiden 2024 yaitu terkait dengan debat yang berlangsung pada putaran pertama dengan tema yang diangkat mencakup hukum dan hak asasi manusia. Dalam debat tersebut, Aljazeera menyoroti bahwa ketiga pasangan calon memiliki fokus yang berbeda, di mana Prabowo Subianto menjelaskan terkait isu demokrasi, sementara Anis dan Ganjar menekankan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi. Al Jazeera mengaitkan sejumlah hal ini dengan kondisi Indonesia saat ini yang mengalami kemunduran demokrasi. Media tersebut juga menyoroti bahwa dalam putaran debat, semua calon presiden tidak berhasil menawarkan pendekatan baru terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia (Llewellyn, 2023).

Sama seperti liputan dari media Australia, seperti yang diberitakan oleh ABC News, mengenai putaran debat yang berlangsung pada bulan Desember 2023. Debat tersebut mencerminkan perhatian terhadap data yang disajikan oleh Indonesia Corruption Watch, yang menyoroti kerugian negara Indonesia sebesar 230 triliun dalam kasus korupsi selama 10 tahun terakhir. Jumlah tersebut setara dengan kebutuhan untuk membangun 27.000 Puskesmas. Selain itu, media Australia juga memberikan perhatian terhadap perkembangan kasus di Papua yang belum terselesaikan hingga saat ini, terkait dengan gerakan separatis yang berlangsung selama puluhan tahun (Australia News, 2023). Di sisi lain, media Singapura memberikan sorotan khusus terkait karakteristik ketiga calon presiden dan janji kebijakan yang diungkapkan selama putaran debat. Selain itu, dilaporkan adanya beberapa topik penting, seperti upaya pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan publik, perbaikan dalam sistem hukum, dan manajemen keharmonisan masyarakat.

Adanya perhatian yang diberikan oleh media internasional terbukti mempengaruhi persepsi global terhadap Indonesia. Sebagai contoh, liputan dari media ternama seperti Al Jazeera mencerminkan keprihatinan terkait kemunduran demokrasi di Indonesia, tingkat korupsi yang tinggi, dan insiden pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih lagi, peningkatan gerakan separatisme di Papua menjadi sorotan yang semakin memperburuk citra Indonesia di kancah internasional. Di sisi lain, media lain seperti China News memfokuskan perhatian mereka pada Wakil Presiden Prabowo Subianto, khususnya menyoroti peran Gibran, putra sulung Prabowo, yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan ayahnya (Woro Yuniar, 2023).

Begitu juga di debat kedua KPU yang menampilkan calon wakil presiden dari masing-masing kubu mendapat perhatian serius dari media internasional. Gibran salah satunya yang disorot dan dipuji penampilannya ketika berdebat. Media Al Jazeera yang berbasis di Qatar menilai Gibran berhasil memenangkan debat antara calon wakil presiden tersebut yang sebelumnya direndahkan dan dinapikan kemampuannya karena usianya yang masih sangat muda. Labeling sebagai *napobaby* ternyata tidak berpengaruh terhadap penampilan Gibran di debat tersebut. Pengalaman dua tahun sebagai wali kota Solo telah dipersiapkan dengan baik untuk ikut kontestasi di Pilpres 2024. Gibran juga dinilai berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat terutama pendukungnya karena berhasil mengimbangi dan mengungguli kedua lawan debatnya yang sangat berpengalaman.

KESIMPULAN

Pilpres 2024 ditandai dengan banyaknya drama sosial politik yang terjadi sebelum dan selama masa kampanye Pilpres. Para kandidat terus bermunculan meskipun Jokowi dari awal telah memperingatkan bahwa dia akan mendukung calon yang memiliki visi melanjutkan program pembangunannya. Jokowi secara terbuka menyatakan cawe-cawenya untuk memastikan Indonesia memiliki pemimpin yang berani, tegas, dan visioner untuk melanjutkan estapet pembangunan yang sedang berjalan termasuk pembangunan ibu kota baru IKN. Dari tiga calon yang muncul di awal-awal penjangkaran calon presiden yaitu Anies, Ganjar dan Prabowo, Jokowi hanya mendukung dua nama yakni Ganjar dan Prabowo karena mereka terus mewacanakan pembangunan berkelanjutan. Sementara Anies Baswedan mengambil #tagline kampanye melawan arus yakni “perubahan” untuk keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Anies menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Jokowi, apalagi pada Pilkada DKI Jakarta sebelumnya Anies berhasil menumbangkan calon yang didukung oleh Jokowi yaitu Ahok, yang juga petahan Gubernur DKI Jakarta.

Upaya penjegalan pencalonan Anies terus menggelinding di media nasional. Meski mengalami drama politik yang hebat mulai dari kurangnya jumlah suara partai pengusung, sampai isu labeling penghianat setelah memutuskan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, namun akhirnya Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar dan calon presiden pertama yang mendaftar ke KPU. Pada saat yang bersamaan, drama sosial pencalonan Ganjar Pranowo juga tidak kalah seru karena isu keretakan Jokowi dengan PDIP pasca pembatalan piala dunia U-20 dan gagalnya Jokowi menyandingkan Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Konflik dan perpecahan sangat nampak antara Jokowi dan PDIP dan mengalami puncak setelah Gibran, anak sulungnya menyanggupi pinangan kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai pendamping Prabowo Subianto. Gibran terus diserang dengan isu konstitusi pasca putusan MK, dan politik dinasti yang terus dihembuskan oleh elit-elit PDIP. Jokowi kemudian membalas dengan penurunan Baliho pasangan Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP yang terpasang di beberapa daerah termasuk di Bali yang menjadi kandang partai berlogo banteng ini.

Posisi Jokowi terus disorot terutama netralitasnya selama masa kampanye Pilpres. Lawan-lawan politik Jokowi terus memantau aksi Jokowi yang sulit untuk netral karena anaknya ikut dalam kontestasi Pilpres kali ini. Beberapa kegiatan Jokowi seperti makan bakso bersama Prabowo, pembagian Bansos di depan istana, menguntit jejak kampanye Ganjar di beberapa daerah dinilai sebagai bentuk ketidaknetralan seorang presiden. Oleh karena itu, tekanan terus dilakukan oleh lawan-lawan politik Jokowi terutama dari kader-kader partai PDIP yang dulunya mendukung dan bersahabat dengan Jokowi. Pada saat yang bersamaan, media internasional seperti Al Jazeera yang berbasis di Qatar dan media dari Australia, Amerika dan Inggris memberi atensi besar terhadap jalannya Pilpres di Indonesia. Mereka tidak hanya memantau perjalanan pesta demokrasi tersebut dari luar, tetapi menyaksikan langsung

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



perdebatan antara calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Aksi Gibran di panggung debat dinilai oleh Al Jazeera berhasil menarik simpati publik dan ekspektasi mereka karena menunjukkan performan yang sangat luar biasa di acara debat tersebut.

REFERENSI

- Australia News. (2023, December 13). *Indonesian presidential candidates clash on security and corruption in first of five debates ahead of the election*.
- CNBC. 2023. *Jokowi Blak-blakan akan Cawe-cawe: Demi Bangsa dan Negara*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529205350-4-441593/jokowi-blak-blakan-akan-cawe-cawe-demi-bangsa-dan-negara>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- CNBC. 2023. *Ramai-ramai Tokoh Beri Komentar Jokowi Cawe-cawe*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602081326-4-442502/ramai-ramai-tokoh-beri-komentar-jokowi-cawe-cawe>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- CNN Indonesia. 2023. *Profil Almas, Mahasiswa Pengagum Gibran yang Gugatannya Dikabulkan MK*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231016161051-12-1011930/profil-almas-mahasiswa-pengagum-gibran-yang-gugatannya-dikabulkan-mk>. Diakses pada 9 Desember 2023.
- Detikcom. 2023. *Beredar Foto Kantor PDIP Solo Didatangi Polisi, Begini Penjelasan Kapolresta*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7026178/beredar-foto-kantor-pdip-solo-didatangi-polisi-begini-penjelasan-kapolresta>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- Detiknews. 2023. *Survei LSJ: Survei LSJ: 66,5% Responden Yakin Jokowi Endorse Prabowo-Gibran*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7011432/survei-lsj-66-5-responden-yakin-jokowi-endorse-prabowo-gibran>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- Djajanto Basorie, A. (2023, May 29). *After Jokowi: What Indonesia's next president could face in foreign affairs*. The Interpreter. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/after-jokowi-what-indonesia-s-next-president-could-face-foreign-affairs>.
- Farisa, F. (2023). *Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti 3 Capres: Ganjar, Prabowo, dan Anies*. *Kompas.Com*.
- Febrianto, A., Nugroho, D., & Pravitasari, S. G. (2023). *Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi*. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(2), 67-79.
- Hamdi, S. (2024). *Gaya Politik Samsul di Panggung Pilpres 2024*. Mataram: Pulham Media
- Hamdi, S., Rahmawadi, I., Nasrullah, A., Riduan, I. M., & Prasojo, Z. H. (2023). *JAMAAH TABLIGH DAN PERGESERAN IDENTITAS POLITIK KEAGAMAAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT*. *Harmoni*, 22(1), 143-166.
- Kompas. 2022. *Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/10440681/nasdem-resmi-deklarasikan-anies-baswedan-jadi-capres-2024>. Diakses pada 28 November 2023.
- Hidayat, T. (2023). *Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024*. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1). <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>.
- Kompas. 2023. *Gibran dan Polemik Dinasti Politik*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/23/gibran-dan-polemik-dinasti-politik>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- Kompas. 2023. *Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/06000011/prabowo-atau-ganjar-pranowo-siapa-dapat-endorse-jokowi-pada-pilpres-2024?page=all>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- Kurniawan, D., Ifani, M. Z., Shovmayanti, N. A., Amalin, K., Prakosa, F. A., & Lestari, L. T. (2023). *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Deklarasi Calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Media Asing*. *Cohesin*, 1(2), 177-183.
- Llewellyn, A. (2023, December 13). *Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo and Anies Baswedan spar over human rights and law in their first televised encounter*. Aljazeera.

<https://www.aljazeera.com/news/2023/12/13/indonesias-first-presidential-debate-five-key-takeaways>.

M.Tazr. (2019). Politik Hujat dalam Sistem Komunikasi Politik Indonesia (Studi Fenomenologi Cebong-Kampret). *Jurnal Communiverse*, 4(2).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660#:~:text=Batas%20Usia%20Capres%2DCawapres%2040,yang%20Dipilih%20dari%20Pemilu%2FPilkada>. Diakses pada 10 Desember 2023.

Media Indonesia. 2023. *Gibran Dinilai Terlalu Muda dan Minim Pengalaman untuk Jadi Cawapres*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/623594/gibran-dinilai-terlalu-muda-dan-minim-pengalaman-untuk-jadi-cawapres>. Diakses pada 10 Desember 2023.

Nasional Tempo. 2023. *PDIP Ungkap Alasan Buka Manuver Jokowi Minta 3 Periode*. <https://nasional.tempo.co/read/1789688/pdip-ungkap-alasan-buka-manuver-jokowi-minta-3-periode>. Diakses pada 10 Desember 2023.

Pacific, A. (2023, April 21). *Who is running for president in Indonesia's 2024 election?* <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/who-is-running-president-indonesias-2024-election-2023-04-21/>.

Purnawan S.A., Ali M., Muhamad I.R., Muhammad S. 2023. *Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja! Zaenal Arifin Mochtar*. Indonesia. Mojokdotco. 70 menit.

Pospíšilová, J. (2023). Who is mobilized by the presidential election? *Acta Politologica*, 15(3). https://doi.org/10.14712/1803-8220/17_2023

Republika. 2023. *Alasan Partai Demokrat Gabung Koalisi Prabowo, Bukan Koalisi Ganjar*. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s1cyop291/alasan-partai-demokrat-gabung-koalisi-prabowo-bukan-koalisi-ganjar>. Diakses pada 30 November 2023.

Roosinda, F. W., & Alfrait, A. (2019). Rekonsiliasi joko widodo dan prabowo subianto pasca pemilu 2019 dalam pemberitaan detik.com, cnnindonesia.com dan viva.co.id periode 13-27 juli 2019. *Jurnal Kajian Media*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jkm.v3i2.2003>.

Simamora, J., & Rusadi, U. (2024). Pertarungan Makna Atas Pernyataan Cawe-Cawe Presiden Jokowi Mengenai Pemilu 2024 di Media Indonesia. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(1), 489-502.

Syanur, A. D. M., AW, I. B. S., & Afrilia, L. (2023). Politik Dinasti Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(3), 17-26.

Tarzi, M. (2019). Cebong Dan Kampret Dalam Pespektif Komunikasi Politik Indonesia. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 3(1).

Tempo. 2023. *Deklarasikan Gibran Cawapres dari KIM, Prabowo: Aklamasi Bulat*. <https://nasional.tempo.co/read/1787263/deklarasikan-gibran-cawapres-dari-kim-prabowo-aklamasi-bulat>. Diakses pada 28 November 2023.

Viva. 2023. *Pengamat Sebut Jokowi tidak Lagi Endorse Ganjar Pranowo di Pilpres 2024*. <https://jatim.viva.co.id/kabar/3583-pengamat-sebut-jokowi-tidak-lagi-endorse-ganjar-pranowo-di-pilpres-2024>. Diakses pada 9 Desember 2023.

Woro Yuniar, Y. (2023, December 7). *Indonesia election 2024: Prabowo flying high despite 'negative sentiments' towards Gibran*. South Cina Post. <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3244190/indonesia-election-2024-prabowo-flying-high-despite-negative-sentiments-towards-gibran>